

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah *perss* (Inggris) atau *Pers* (Belanda) yang berarti menekan (*pressing*) karena mesin cetak menekan ke atas untuk memunculkan tulisan. Secara harfiah pers berarti mencetak dan penyiaran yang tercetak atau publikasi yang dicetak (*printed publication*). Berdasarkan penjelasan di atas pers memiliki dua pengertian yakni pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit.

Pers dalam arti luas meliputi segala penerbitan, sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada media cetak yaitu seperti surat kabar, majalah, tabloid dan buletin. Berkaitan dengan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pers dalam penelitian ini adalah pers dalam arti sempit yaitu menyangkut produk penerbitan berupa surat kabar, majalah, tabloid dan buletin.<sup>1</sup>

Sejarah pers di Indonesia digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu: pers nasional, pers kolonial dan pers Cina.<sup>2</sup> Awal sejarah pers di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus terkait dengan kehidupan masyarakat, kebudayaan, dan politik. Hal tersebut berpengaruh dalam perkembangan pers di Indonesia sehingga muncul pers di Belanda, pers Melayu-Tionghoa, pers masa pendudukan Jepang, dan pers setelah kemerdekaan Indonesia. Seiring munculnya jenis-jenis pers yang berkembang maka bahasa pers yang digunakan juga berbeda sesuai dengan kebutuhan.<sup>3</sup>

Perkembangan pers berjalan sejajar dengan ekspansi bertahap yang dilakukan oleh Belanda. Berawal dari kedatangan bangsa tersebut di Nusantara, melalui kongsi dagang *verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) menyadari bahwa pers berguna untuk mencetak aturan hukum yang memuat maklumat resmi pemerintah.

Sejak itulah pers di Indonesia berkembang. Usaha pertama untuk memulai mencetak surat kabar resmi dimulai pada masa Gubernur Jendral Van Imhof, yang pada tahun 1744 menerbitkan *Bataviache Nouvelles* yang bertahan kurang lebih selama dua tahun. Hal ini

---

<sup>1</sup> Indah Suryani, *Jurnalistik Suatu Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 25.

<sup>2</sup> Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Triyinc, 1977), hlm.17

<sup>3</sup> Olyvie Bintang Haritajaya, *Pembredelan Pers Di Massa orde baru (1966-1998)*, 2017, hlm. 1

disebabkan karena para direktur *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di negeri Belanda mendengar bahwa surat kabar itu dan langsung menulis kepada Gubernur Jendral terkait dengan keberadaan surat kabar tersebut ”karena kami telah menemukan akibat-akibat yang membahayakan akibat di negeri ini dalam mencetak dan menerbitkan surat kabar di Batavia. Pada saat menerima surat ini akan segera melarang percetakan dan penerbitan surat kabar yang terkait”.<sup>4</sup>

Pers tumbuh di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang dan Surabaya yang merupakan kota pelabuhan yang berperan sebagai pusat lalu lintas pengangkutan hasil pertanian yang berasal dari wilayah pedalaman. Sebagai kota pelabuhan, maka kota-kota besar itu cenderung menarik perhatian pedagang dan saudagar dari berbagai bangsa, sehingga di kota-kota tersebut mereka melakukan transaksi perdagangan sekaligus tempat memasarkan komoditas dagang mereka. Informasi terkait hal-hal tersebut tentang harga pasar, jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal dan lain-lain dapat diketahui dari keberadaan Pers.<sup>5</sup>

Saat itu, Pemerintahan Kolonial<sup>6</sup> tidak peduli dengan keadaan masyarakat Indonesia karena dianggap tidak memberikan keuntungan, bahkan untuk mengetahui tentang surat kabar yang ditulis rakyat pribumi dirasa tidak perlu. Oleh sebab itu pemerintahan kolonial hanya mementingkan surat kabar Belanda karena berguna dalam memonopoli berita perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Bahasa yang digunakan pers Belanda yaitu menggunakan bahasa Belanda sehingga pembaca surat kabar sangat terbatas hanya kalangan tertentu saja yang bisa membaca surat kabar Belanda seperti keturunan Indo-Belanda.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dari gambaran kondisi perkembangan pers yang demikian, terasa pengawasan terhadap pers oleh pemerintah Kolonial sangat ketat. Atmakusumah, mantan ketua Dewan pers dan redaktur harian Indonesia Raya, dalam buku tuntutan Zaman kebebasan pers dan ekspansi, mendeskripsikan keadaan masa Hindia Belanda. Menurutnya Hindia Belanda sudah memiliki media pers cetak atau surat kabar pertama pada 1712. Akan tetapi De Heeren Zeventien, 17 direktur VOC di Nederland melarang rencana penerbitan surat kabar di Batavia. Menurut rencana, terbitan itu akan berisi abar dalam Negri, berita kapal, dan semacam itu” rencana itu di gagalkan karna VOC karna VOC takut para pesaingnya akan mendapat keuntungan dari berita yang dimuat oleh surat kabar itu. Lihat. Olyvie Bintang Haritajaya, *Pembredelan Pers Di Massa orde baru (1966-1998)*, 2017, hlm. 1 . Lihat. Smith Edward Cecil, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm.1

<sup>5</sup> Sayadah Akla, *Perkembangan Pers dalam kaitanya dengan Perkembangan politik di Semarang tahun 1912-1930*. (2007) hlm. 2

<sup>6</sup> Dalam kbbi Kolonial adalah berhubungan dengan sifat jajahan, pemerintahan, mendirikan benteng dan menguasai jaku pelayaran dikepulauan itu. KBBi Offline, aplikasi luring resmi Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018.

<sup>7</sup> Olyvie Bintang Haritajaya, *op.cit*, hlm. 2.

Tentunya pers tidak hanya berkembang di wilayah-wilayah yang besar secara administratif seperti Batavia, Semarang dan Surabaya saja. Cirebon sebagai daerah penting di Jawa Barat pun ikut merasakan hegemoni perkembangan pers pada masa kolonial Belanda. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa perkembangan pers di Jawa Barat sejak awal menjadi catatan penting dan strategis dalam sejarah media cetak di Indonesia, baik di Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Cirebon, Sukabumi dan Banten silih berganti yang dilakukan kaum nasionalis dalam menerbitkan surat kabar.

Pengelolaan media secara professional dikembangkan dengan idealisme perjuangan mewarnai konten dari media tersebut. Media massa, khususnya surat kabar pada masa itu oleh kaum nasionalis digunakan dan dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dalam menentang penjajahan Belanda.

Oleh karena itu surat kabar sering berumur tidak panjang dan pimpinannya itu sering berurusan dengan polisi rahasia yang senantiasa mengawasi dan memata-matai kaum pergerakan nasional. Sangat terkenal waktu itu polisi yang disebut, PID (*Politieke Inlichtingen Dienset*). Segala laporan PID menjadi dasar bagi Belanda untuk melakukan tindakan larangan penerbitan koran dan memenjarakan orang-orang yang terlibat pada penerbitan surat kabar tersebut.

Penerbitan surat kabar yang berbahasa Indonesia atau Melayu dan surat kabar berbahasa Sunda secara kuantitatif seimbang jumlahnya. Surat kabar berbahasa Sunda lebih akrab dengan masyarakat Jawa Barat terutama di daerah Priangan. Asas kedekatan komunitas rupanya sangat berpengaruh dan ada juga surat kabar yang berbahasa Tionghoa.

Surat kabar Tjiremai terbit pada tahun 28 Februari 1890. Surat kabar ini adalah surat kabar pertama di Cirebon. Terbit dengan menggunakan bahasa Belanda dengan nama *zaterdag*. Koran berbahasa Belanda ini tersimpan di Perpustakaan Nasional RI.

Selain surat kabar Tjiremai, terbit juga surat kabar berbahasa Sunda yang pertama diterbitkan di Bandung yaitu “Soeara-Merdeka” pimpinan Moh. Sanoesi. Tahun I no.3 terbit pada tanggal 1 Mei 1920. Pada tahun 1935 di Bandung tercatat penerbitan Koran “Nicorx-Express”. Koran stensilan pertama di Bandung kemudian menjadi harian dengan pemimpin umum /pemimpin redaksi Brantanata. Jajaran redaksinya Djamal Ali dan Ahmad Zainun Soetan Palindih. Selanjutnya terbit “Berita Priangan” dipimpin Ali Rataman dengan pemimpin redaksi Yaman dan Bakri Soera Atmadja. Adapula “sepakat” dipimpin A.Hamid.

Di Cirebon juga tercatat “Poesaka Cirebon” pimpinan Darma Atmaja, “Warta Tjirebon” dan “Soeloeh Ra’jat” pimpinan Anwar Djarkasih. Tahun 1932 tercatat “Soeara Poeblik” pimpinan Soejitno dan Liem Koen Hian. Ada catatan yang tersisa dari perkembangan Pers Jawa Barat. Setelah terjadinya pemberontakan kaum merah November 1962, sejumlah surat kabar terbit di beberapa kota di Jawa Barat. Khususnya Kota Bandung. Tercatat di Bandung, terbit Koran “Indonesia Moeda” dan terbit pula ‘ra’jat” yang sangat terkenal dengan tulisan Bung Karno, *Indonesia Menggoegat*. Pemikiran dan tulisan Bung Karno yang dimuat itulah yang membawanya ke sidang pengadilan dan divonis penjara.

Ramainya penerbitan Koran Melayu Indonesia di Jawa Barat, pada waktu bersamaan diikuti oleh penerbitan bahasa Sunda. Penerbitan bahasa Sunda kala itu tidak dapat dipisahkan dari pergerakan kaum Nasionalis di Jawa Barat. Di masa itu terbit juga “*Mingguan Soenda Soemangat*” diasuh Tunggono menggunakan bahasa Sunda “Padjajaran” dipimpin Haris Soema Amidjaja dan “Siliwangi” diasuh Ema Brata Koesoma, Tercatat pula data terbitnya “Pendawa” pimpinan Gatot, berkala, berbahasa Sunda “Masa Baroe”, “Sapoe Djagat”, “Simpaj”, dan “Isteri Merdeka” ada pula penerbitan Koran “panglima” di Tasikmalaya.

Di zaman kependudukan Jepang semua surat kabar yang ada di Bandung dan Jawa Barat ditutup. Semuanya disatukan menjadi surat kabar “Tjahaja” di bawah pengawasan *Sendebu*. Pimpinan “Tjahaja” waktu itu ditunjuk oleh Oto Iskandar Dinata dan Branat. Penghentian surat kabar di Bandung dan sekitarnya oleh Jepang kemudian dilebur menjadi surat kabar “Tjahaja” merupakan bagian dari usaha Jepang untuk mengawasi penerbitan surat kabar secara ketat.<sup>8</sup>

Berangkat dari pemaparan di atas dan menilik perkembangan pers di Jawa Barat yang mengalami pasang surut dan dinamika, maka berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengajukan sebuah topik penelitian mengenai “Sejarah dan Perkembangan Pers di Cirebon tahun 1890-1945”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncullah beberapa pertanyaan pokok dari penelitian ini sebagai berikut.

### **1. Bagaimana Sejarah munculnya Pers di Cirebon?**

---

<sup>8</sup> Koran pertama di Cirebon terbitan 1891 berbahasa Belanda, Cirebon: Radar Cirebon.com, diunduh pada tanggal 21 September 2019, pada pukul 08.00 WIB, dalam web. [www. Radarcirebon.com](http://www.Radarcirebon.com).

2. Bagaimana perkembangan Pers di Cirebon tahun 1890- 1945?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sejarah munculnya Pers di Cirebon.
- b. Untuk mengetahui perkembangan Pers di Cirebon antara tahun.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Memberi pengetahuan tentang sejarah munculnya Pers di Cirebon.
- b. Memberi manfaat bagi pembaca tentang sejarah lokal utamanya di Cirebon berkaitan dengan Pers.

### D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Cirebon yang merupakan salah satu kota yang pada waktu itu menjadi kegiatan penerbitan pers makin menaik. Di Cirebon ini terbit surat kabar “*Tjiremai*”.

Dalam penelitian ini ruang lingkup waktunya ditentukan antara tahun 1890-1945. Tahun 1890 merupakan batasan awal dalam penelitian ini, di mana surat kabar di Jawa Barat ada yakni di Cirebon yang diterbitkan oleh *Tjiremai* Raya. Penelitian ini dibatasi pada hingga tahun 1945 yaitu pada saat Jepang telah menyerah atas sekutu, sehingga dimanfaatkan oleh golongan muda untuk segera merdeka. Pada saat pemerintahan Jepang ini semua surat kabar dilarang terbit.

### E. Kerangka Teori

Teori merupakan sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait-mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang terkait dengan fenomena,

dalam hal ini fenomena sejarah.<sup>9</sup> Bila berbicara mengenai konsep pers terkait topik penulis, maka ada beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu:

## 1. Pengertian Pers

Kata Pers berasal dari bahasa Inggris *Press*, istilah Pers dalam pengertian luas, mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi, berita. Pers dalam pengertian sempit hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melalui proses percetakan seperti majalah, surat kabar.

Pada proses komunikasi, pers adalah perantara atau saluran bagi pernyataan-pernyataan yang oleh penyampainya ditunjukkan pada penerima. Pers sebagai saluran bagi pernyataan umum yang berasal dari individu-individu dalam surat kabar, radio, masalah, televisi, dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 2. Teori Pers

### a. Teori Pers Otoriter ( Authoritarian)

Teori ini lahir pada abad ke-15 sampai ke-16 pada masa bentuk otoriter. Pada teori ini media massa berfungsi menunjang negara dan pemerintah dengan kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahan mengawasi secara langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa, kebebasan pers tergantung pada kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan mutlak.<sup>11</sup>

Manusia dalam teori pers otoriter merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat berdiri sendiri. Masyarakat terstruktur dalam organisasi-organisasi yang bertujuan pada Negara karena Negara adalah pusat segala kegiatan.

Sistem Pers otoriter berpandangan bahwa kependudukan negara lebih tinggi dari pada individu dalam kehidupan sosial. Teori ini dipakai oleh Benito Mussolini yang

---

<sup>9</sup> Saefur Rachmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 102.

<sup>10</sup> S Setyani, *Tinjauan Teori Pers*, diterbitkan oleh IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 1. Diunduh pada tanggal 21 September 2019 pada pukul 09.00 WIB, dalam web. [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id)

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 2

berpendapat bahwa anggota masyarakat tidak dapat memerintah negara. Tokoh lain yang menganut paham ini adalah Adolf Hitler yang berpendapat kebenaran adalah yang menguntungkan kepentingan dan soliditas negara Jerman.

b. Teori Pers Liberal (libertarian)

Teori ini berkembang pada abad ke-17 dan ke-18. Teori Pers Liberal berpandangan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensi bila diberi kebebasan menyatakan pendapat. Kebenaran dan pengetahuan diperoleh manusia dengan usahanya sendiri. Pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya tanpa harus dikekang oleh pihak berkuasa. Kebebasan Pers dalam teori Liberal adalah bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari kebenaran. Pers pada teori ini banyak memberi landasan kebebasan dalam informasi dan hiburan tetapi sedikit kebijakan yang tersiar dan sedikit kontrol pada pemerintah.<sup>12</sup>

c. Teori Pers Komunis

Teori komunis berkembang pada awal abad ke-20. Media massa dalam teori komunis merupakan alat pemerintahan (partai) dan bagian integral dari Negara. Media harus tunduk pada pemerintah dan bagian dari Negara. Media harus tunduk pada pemerintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai.

Pers harus melayani kelas dominan dalam masyarakat. Fungsi pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan “indoktrinasi massa” atau bimbingan masa yang dilakukan oleh partai, selain menyatakan bahwa Pers merupakan satu-satunya alat untuk membantu partai bicara dengan kelas pekerja setiap hari. Kebebasan Pers dan kebebasan menyataka pendapat dari bunyi pasal 125 konstitusi Stalin 1963 menyatakan bahwa kebebasan Pers dan kebebasan menyatakan pendapat benar-benar dijamin konstitusi, dengan pengertian bahwa kebebasan di sini di hubungkan dengan pemilikan modal materi untuk penerbitan dan percetakan ditangan Rakyat.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

Akan tetapi dalam prakteknya kemudian, banyak hal yang dialami Pers Komunis yang menyebabkan Pers Liberal tidak bebas untuk menikmati hak-haknya sesuai dengan konstitusi.

d. Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori ini muncul pada abad ke-20 sebagai protes kebebasan yang mutlak dari teori libertarian, dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab pada masyarakat. Theodore Peterson menyatakan bahwa kebebasan pers harus disertai kewajiban-kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok komunikasi massa. Berdasarkan teori yang diungkapkan Peterson, kebebasan pers harus disertai kewajiban bertanggung jawab. Teori tanggung jawab sosial berorientasi pada kepentingan umum. Tugas pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

e. Teori Pers Pembangunan

Pers pembangunan lahir pada tahun 1950 dari gagasan UNESCO. Pers pembangunan atau yang lebih dikenal *development journalism* menunjuk pada proses komunikasi melalui media massa, baik media massa cetak maupun elektronik dan media lainnya. Pers pembangunan berperan dan berfungsi ikut secara aktif dalam upaya pembangunan bangsa.

f. Teori Partisipasi Demokratik

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat menjelaskan bahwa teori ini lahir pada masyarakat liberal yang sudah maju. Teori partisipasi demokratik muncul sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta. Teori ini muncul untuk melawan sentralisme dan birokratisasi institusi siaran Publik yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial. Teori partisipasi demokratik melihat media massa terlalu dekat dengan kekuasaan, terlalu responsif terhadap rekan politis dan ekonomis.

### 3. Peranan Pers



Pers mempunyai peranan penting sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. pers dapat berperan penting sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Pers berperan sebagai penghubung yang kreatif antara masyarakat dan pemerintah.<sup>13</sup>

Peranan pers lainya adalah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran poilitik rakyat dan dalam menegakan disiplin nasional. Pers berperan pula sebagai agen perubahan atau *agent of change*. Sebagai *agent of change*, pers membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Tugas Pers sebagai agen perubahan untuk menunjang perubahan sosial dan pembangunan ialah:

- a. memperluas cakrawala pandangan
- b. memusatkan perhatian khalayak
- c. membunuh aspirasi
- d. menciptakan suasana pembangunan

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini penting untuk menelusuri dan juga menelaah kepustakaan, sehingga dapat mempelajari dan merintis kerangka pemikiran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya tinjauan pustaka ini setidaknya memberi pengarahan sewajarnya dalam membuat karya ilmiah. Adapun beberapa leteratur pustaka terdahulu yang membahas mengenai media masa atau pers diantaranya:

1. Makalah yang berjudul *Perjuangan Meraih Kebebasan Pers Pada Era Kolonial* yang ditulis oleh Dara Rahmania, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tahun 2014. Makalah ini membahas Pers Indonesia pada masa Hindia Belanda di mana masa ini penuh dengan kekangan atau aturan-aturan yang berlaku guna mempersempit ruang gerak pers.

Persamaan sekripsi ini dengan karya tulis di atas dimana sama-sama mengenai pers pada masa Hindia Belanda Secara tahun, di mana penulis juga membahas era Hindia Belanda. Perbedaan makalah dengan penulis ini adalah penulis memperlus penelitian hingga massa Jepang. Kemudian secara tempat penelitian penulis lebih rinci di Cirebon.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 4-6

2. Artikel yang berjudul *Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia*, yang ditulis oleh Sri Hadijah Arnus. Secara umum artikel ini membahas mengenai perkembangan sistem pers Indonesia era Presiden Habibi, di mana sistem pers mengikuti sistem politik yang berkuasa.

Persamaan skripsi ini dengan artikel di atas adalah sama-sama membahas mengenai perkembangan pers di Indonesia.

Secara jelas artikel ini berbeda dengan penelitian penulis karena artikel ini membahas pers atau media masa era Habibi sedangkan penulis lebih luas lagi dan secara rinci membahas mengenai sejarah dan perkembangan pers di Indonesia dan Cirebon tahun 1890-1945.

3. Skripsi yang ditulis oleh Saydah Aklah berjudul *Perkembangan Pers Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Politik di Semarang Tahun 1912 – 1930* yang diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang Tahun 2007. Skripsi ini memiliki kesamaan tema yaitu pers atau media masa. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai perkembangan pers di Semarang, kebijakan pemerintah yang mengatur pers dan sikap masyarakat terhadap kebijakan pers yang diberlakukan pemerintah Belanda di Semarang berkenaan pers.

Persamaan skripsi ini dengan karya tulis di atas sama-sama mengenai sejarah dan perkembangan pers pada masa Hindia Belanda.

Perbedaan skripsi ini dengan karya tulis di atas adalah mengenai wilayah penelitian. Karena penelitian penulis lebih fokus pada pers di Cirebon tahun 1890-1945.

4. Buku *Sejarah Awal Pers Dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan* di terjemahkan oleh Amarzan Loebis dari disertasi Ahmad Adam. Buku ini menjelaskan mengenai latar belakang munculnya Pers di Indonesia, kemudian muncul koran berbahasa Belanda hingga diumumkannya Undang-Undang Pers. Setelah itu di jelaskan lebih rinci tentang munculnya pers. Menurut Adam buku ini berkisar pada lima tema utama yang pertama menunjukkan bahwa pers merupakan produk sampingan Eropa dibidang budaya dan ekonomi yang bermula pada masa awal VOC pada abad ke 17 Masehi. Kedua mencoba menunjukkan bahwa perkembangan pers didorong oleh motif-motif ekonomi, sosio, kultural dan misionaris.

Ketiga menjelaskan bahwa perkembangan dan pertumbuhan pers merupakan produk lingkungan urban. Ke empat, proses modernisasi mendorong perkembangan Pers yang memacu pertumbuhan intelektual.

Persamaan sekripsi ini dengan penulis dia atas yaitu sama sama membahas sejarah munculnya media masa atau pers.

Perbedaan dari sekripsi ini dengan penulis di atas yaitu penulis lebih fokus pada munculnya dan berkembangnya Pers di Cirebon tahun 1890-1945.

## G. Metode Penelitian

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang *Sejarah dan Perkembangan Pers di Cirebon Tahun 1890-1945*, sehingga untuk merealisasikannya harus melalui metode penelitian sejarah. Dalam penelitian sejarah ada empat tahapan yaitu

### 1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama bagi seorang sejarawan yang akan melakukan penelitian. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, yang diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti.<sup>14</sup> Heuristik sering kali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.<sup>15</sup> Sumber atau catatan yang dimaksud adalah sumber yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji baik itu sumber lisan, tulisan maupun benda. Tanpa dilakukannya pencarian terhadap sumber sejarah, maka seorang sejarawan tidak akan mendapatkan penjelasan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lampau.

Dalam hal ini penulis melakukan langkah-langkah heuristik dengan cara mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan topik kajian di antaranya sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang penulis cari seperti arsip “*Koran Tjiremai Raya* dan *Koranedan Priyayi*” yang menggambarkan tentang media Cirebon saat itu. Sumber-

---

<sup>14</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah (Teori, Metode, Contoh Aplikasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 93.

<sup>15</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 104.

sumber primer tersebut terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Arsip Daerah Kota Cirebon.

Selain itu, penulis juga melakukan pencarian sumber sekunder yang diambil dari beberapa buku yang membahas mengenai buku, skripsi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

## 2. Kritik Sumber

Tahapan selanjutnya dilakukannya pencarian sumber sejarah yakni kritik sumber. Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber.<sup>16</sup> Kritik sumber meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.<sup>17</sup>

Maka penulis melakukan kritik sumber dengan menggunakan cara di atas yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal yakni usaha untuk menguji keaslian (otentisitas) sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber yang ditemukan.<sup>18</sup> Kritik eksternal ini, penulis lakukan dengan cara menyeleksi sisi-sisi fisik dari sumber yang didapat. Seperti, sumber yang didapat berupa dokumen arsip maka harus diteliti kertasnya, kata-katanya, bahasanya, kalimatnya, tinta yang digunakan, gaya tulisannya, juga bentuk luar dari sumber tersebut.

Selanjutnya, penulis melakukan kritik internal yakni kritik yang mengacu pada keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas).<sup>19</sup> Artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak terjadi manipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain.<sup>20</sup> Penulis melakukan pengecekan terhadap isi dari sumber yang didapat, sesuai atau tidaknya dengan bukti dan fakta yang ada.

Sedangkan sumber yang didapat dari internet, penulis mengecek situs webnya yang didapat merupakan situs resmi atau dapat dipercaya. Setelah dilakukan pengaksesan file dari internet, penulis melakukan kritik internal terhadap data yang didapat dari situs website tersebut.

---

<sup>16</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35

<sup>17</sup> Sulasman, *Op.cit*, hlm. 101

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 108

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 109.

<sup>20</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op.Cit*, hlm. 37.

### 3. Interpretasi

Tahap selanjutnya setelah melakukan kritik sumber, hal yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan ketika ingin melakukan penulisan terhadap sejarah yaitu interpretasi. Interpretasi mengandung makna penafsiran.<sup>21</sup>

Maka interpretasi bertujuan menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah yang akan dibahas. Maka pada tahapan ini penulis berusaha menguraikan beberapa fakta yang telah terkumpul yang sebelumnya telah diseleksi pada tahap verifikasi sumber atau kritik sumber.

Bukan sekedar menguraikan fakta-fakta sejarah yang didapat, Penulis juga mengkorelasikan fakta-fakta yang telah diperoleh dari hasil kritik sumber yang kemudian disusun secara kronologis sehingga menjadi sebuah penjelasan yang mudah dipahami.

### 4. Historiografi

Tahap terakhir yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan yakni historiografi. Historiografi merupakan cara merangkaikan fakta-fakta berikut maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah.<sup>22</sup> Setelah melewati tahapan-tahapan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis melakukan pelaporan hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi sebagai hasil karya dalam sebuah penelitian sejarah.

Pada tahap terakhir ini pula, penulis menuangkan dan mengeksplor segala ide-ide yang berdasarkan fakta yang ada yang sesuai dan masuk akal dan dapat diterima oleh pembaca. Sehubungan dengan penelitian tersebut, maka penyampaiannya secara garis besar terdiri atas bagian yakni: pendahuluan, hasil penelitian dan kesimpulan. Yang terdiri atas lima bab yang penjabarannya akan saling berhubungan anatar satu bab dengan bab lainnya.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan tulisan mengenai Sejarah dan Perkembangan Pers di Cirebon pada tahun 1890-1945, maka dalam penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> M. Dien Madjid, dkk, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 29.

<sup>22</sup> Sulasman, *Op.Cit*, hal. 148.

**BAB I** akan membahas pendahuluan yang terdiri dari sub-sub sebagai berikut : Latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran tentang seluruh rangkaian penulisan penelitian sebagai dasar pijakan bagi pembahasan berikutnya.

**BAB II** akan menguraikan tentang sejarah munculnya pers di Indonesia yang terdiri atas dua subbab yaitu sebagai berikut: Sejarah munculnya pers di Indonesia dan Perkembangan pers di Indonesia sebelum Tahun 1890 sampai tahun 1945.

**BAB III** akan menguraikan tentang sejarah munculnya pers di Cirebon yang terdiri atas dua subbab yaitu sebagai berikut: Sejarah Munculnya pers di Cirebon dan Kebijakan mengenai pers di Cirebon.

**BAB IV** akan menguraikan tentang Perkembangan pers di Cirebon.

**Bab V** dalam bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis diharapkan dapat mengambil benang merah dari uraian sebelumnya menjadi rumusan yang bermakna.

